

Indonesia

83%

pemimpin bisnis mengungkapkan bahwa laju elektrifikasi di perusahaan mereka jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan pemerintah membangun sistem pendukungnya.

Kalangan bisnis melihat elektrifikasi menggunakan energi terbarukan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan keamanan energi, tetapi peluang tersebut berisiko hilang jika langkah-langkah transisi tidak segera diakselerasi.

Apa yang Dibutuhkan Dunia Usaha

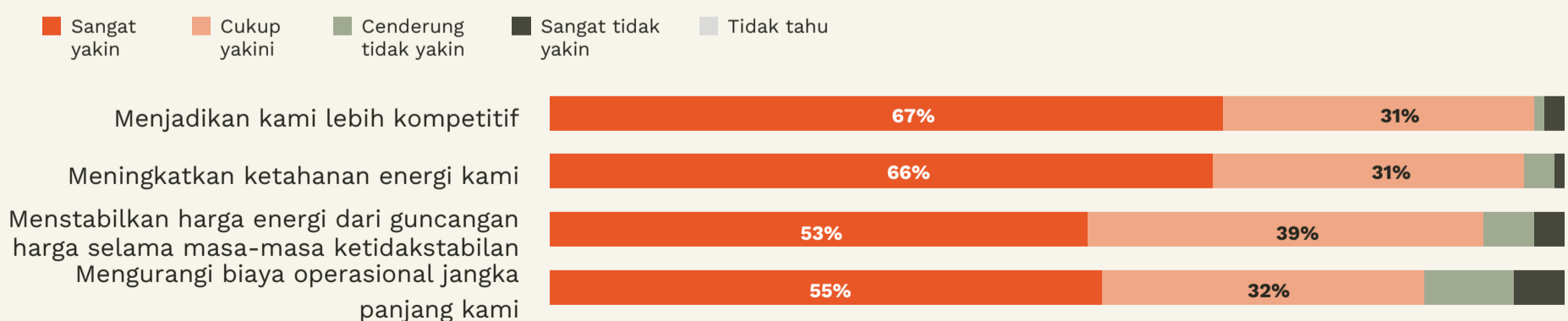
Pimpinan perusahaan menginginkan pemerintah meningkatkan investasi untuk memperkuat kapasitas dan konektivitas sistem transmisi nasional.

Konteks Kebijakan

Kebijakan energi Indonesia menempatkan energi terbarukan sebagai prioritas. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik terbaru PLN yang disusun untuk sepuluh tahun, misalnya, menargetkan energi terbarukan akan menyumbang lebih dari sepertiga (34,3%) bauran listrik pada tahun 2034, meningkat dua kali lipat dari kontribusi saat ini sebesar 15,75%.¹

Target pemerintah untuk sisi permintaan belum sejelas target pengembangan pasokan energi. Meskipun demikian, para pembuat kebijakan mengakui manfaat ekonomi atas peningkatan konsumsi listrik oleh kalangan industri, terutama terkait dampaknya pada daya saing dan keamanan energi. Pandangan ini tersebar luas di kalangan eksekutif senior, dimana mayoritas dari mereka mengatakan bahwa elektrifikasi peralatan mereka akan menjadikan perusahaan mereka lebih kompetitif (97%) dan lebih terjamin dari sisi energi (97%). Keamanan energi menjadi topik yang hangat selama masa pergolakan geopolitik saat ini, mengingat dampaknya pada pasar energi internasional.

Para eksekutif Indonesia meyakini elektrifikasi akan meningkatkan daya saing bisnis dan ketahanan energi.



Terkait dengan kegiatan usaha Anda yang beralih dari peralatan berbasis energi fosil ke peralatan alternatif bertenaga listrik, menurut anda, sejauh mana hal ini akan berdampak pada hal-hal berikut?

¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-gandeng-industri-percepat-elektrifikasi-nasional>

Indonesia

Pemerintah sangat peka terhadap implikasi tekanan harga domestik dan sebagai akibatnya terus mempercepat agenda elektrifikasinya, terutama pada sektor transportasi. Kepekaan ini juga dirasakan oleh kalangan bisnis. Sejak ketegangan geopolitis terbaru, misalnya, 86% eksekutif percaya bahwa Indonesia saat ini terlalu tergantung pada impor bahan bakar fosil.

Elektrifikasi menggunakan energi bersih diyakini akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, tetapi keberhasilannya tergantung pada kapasitas sistem ketenagalistrikan dalam bertindak sebagai alternatif yang andal. Menurut rencana penyediaan listrik 10 tahunnya, PLN berniat membangun "Green Super Grid" (jaringan transmisi hijau skala luas), termasuk jalur transmisi baru hampir sepanjang 48.000 km sirkuit dan kapasitas substasiun baru sekitar 108.000 MVA. Namun, untuk saat ini, 83% pemimpin bisnis atau eksekutif mengatakan bahwa laju elektrifikasi perusahaan mereka jauh lebih cepat daripada sistem yang disiapkan pemerintah. Selanjutnya, 64% mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan elektrifikasi pada operasional mereka adalah kurangnya investasi pemerintah pada infrastruktur terkait jaringan transmisi, yang

menjadi proporsi terbesar dari semua negara yang disurvei. Akibatnya, kalangan eksekutif cenderung memilih ekspansi dan digitalisasi jaringan transmisi (52%) serta pendekatan percepatan perencanaan dan koneksi jaringan transmisi (51%) sebagai intervensi kebijakan pemerintah yang paling diinginkan, di samping perencanaan kebijakan jangka panjang yang lebih jelas (55%).

Sudut Pandang Bisnis

Kuatnya keinginan akan elektrifikasi terlihat jelas di lingkungan dunia usaha Indonesia. Kurang lebih sembilan dari sepuluh (91%) eksekutif memperhitungkan penerapan elektrifikasi pada kegiatan operasional mereka sebelum 2030, sementara lebih banyak lagi (99%) menargetkan pencapaiannya pada tahun 2035. Temuan ini merupakan tingkat keyakinan gabungan tertinggi di antara 18 pasar yang disurvei. Proporsi yang sama besar dari pemimpin bisnis (88%) sepakat bahwa perusahaan mereka akan lebih baik memprioritaskan peralatan listrik dibandingkan peralatan berbahan bakar fosil pada dekade berikutnya. Namun, terdapat selisih antara antusiasme kalangan eksekutif dengan laju perubahan yang diantisipasi oleh kebijakan saat ini.

Indonesia

Sebagai contoh, rencana umum ketenagalistrikan nasional Indonesia masih merencanakan penggunaan batu bara hingga 2059, dengan tambahan kapasitas batu bara sebesar 6,3 GW telah dialokasikan untuk satu dekade kedepan. Sebagai jawabannya, kalangan bisnis ingin melihat perencanaan kebijakan jangka panjang nasional yang lebih jelas berikut tata waktunya, dimana hal ini merupakan salah satu opsi kebijakan yang paling sering dipilih oleh kalangan eksekutif (55%). Hal ini dapat membantu memperbaiki pandangan mayoritas pemimpin bisnis

(65%) yang melihat Indonesia berisiko tertinggal dalam upaya global menuju elektrifikasi. Meskipun demikian, 68% pemimpin bisnis mengatakan bahwa mereka bersedia berinvestasi untuk membangun pembangkit energi terbarukan mereka sendiri jika memang diperlukan. Namun, apabila mereka tidak mampu melakukannya atau akses ke listrik bersih tetap terbatas, sebagian besar (78%) tidak menutup kemungkinan untuk memilih opsi memindahkan operasional mereka ke luar negeri.

